



**EVALUASI ATAS PENERAPAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN (STUDI KASUS PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, KEMENTERIAN AGAMA)**

**Muchammad Nuh<sup>1</sup>, Karnadi<sup>2</sup>, Agung Edi Rustanto<sup>3</sup>, Harits Hijrah Wicaksana<sup>4</sup>**

Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [muchammad.nuh@gmail.com](mailto:muchammad.nuh@gmail.com)

Diterima: 17/01/26; Direvisi: 25/01/26; Diterbitkan: 04/05/2026

**ABSTRAK**

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran merupakan instrumen penting dalam penganggaran berbasis kinerja untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerapan sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang mengintegrasikan monitoring dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi Context, Input, Process, dan Product. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks, sistem monitoring dan evaluasi telah selaras dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, regulasi, dan kebutuhan organisasi. Dari aspek input, masih ditemukan kendala berupa ketidaksinkronan regulasi, duplikasi indikator penilaian, serta keterbatasan sistem informasi. Dari aspek proses, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berjalan cukup baik melalui pemantauan berkala dan koordinasi antarunit. Sementara itu, dari aspek produk, hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum optimal dalam mendukung penyusunan kebijakan anggaran tahun berikutnya.

**Kata Kunci:** *Monitoring Dan Evaluasi, Kinerja Anggaran, Penganggaran Berbasis Kinerja, Evaluasi Kebijakan*

**ABSTRACT**

The monitoring and evaluation system for budget performance is an essential instrument in performance-based budgeting to ensure effectiveness, efficiency, and accountability in the management of the State Budget. This system is implemented under the Regulation of the Minister of Finance Number 62 of 2023, which integrates monitoring and evaluation into budget planning and implementation. This study aims to evaluate the policy implementation of the budget performance monitoring and evaluation system at the Directorate General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religious Affairs. The study employs a qualitative approach using the Context, Input, Process, and Product evaluation model. Data were collected through document analysis and in-depth interviews and analyzed using interactive data analysis techniques, with validity ensured through source and method triangulation. The findings indicate that, from the context aspect, the monitoring and evaluation system is aligned with performance-based budgeting policies, regulatory frameworks, and organizational needs. From the input aspect, several challenges remain, including regulatory inconsistencies, duplication of assessment indicators, and limitations in information systems. From the process aspect, the



monitoring and evaluation activities have been implemented adequately through periodic monitoring and inter-unit coordination. However, from the product aspect, evaluation results have mainly been used for rewards and sanctions and have not been optimally utilized in formulating subsequent budget policies.

**Keywords:** *Monitoring And Evaluation, Budget Performance, Performance-Based Budgeting, Policy Evaluation*

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi belanja negara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta transformasi ekonomi dan digital. Besarnya alokasi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan anggaran yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga efektif dan berorientasi pada kinerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Andari et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, monitoring dan evaluasi (monev) kinerja anggaran menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan hasil yang optimal. Monitoring memungkinkan pemantauan kemajuan pelaksanaan anggaran secara berkala sehingga potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditangani secara dini, sedangkan evaluasi berfungsi untuk menilai capaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan di periode berikutnya. Dengan demikian, monev tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dalam pengelolaan keuangan negara (Megah S & Valiant S, 2025; Rosmiati & Rizkianto, 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tidak terlepas dari penerapan konsep *e-government*. Konsep ini merujuk pada upaya digitalisasi administrasi dan manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Heeks. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa penerapan *e-government* berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Taiwo, 2024).

Dalam perspektif *New Public Management*, digitalisasi mendorong pengelolaan sektor publik yang lebih berorientasi pada hasil dan kinerja sebagaimana dijelaskan oleh Hood. Temuan empiris terkini juga menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sektor publik berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, serta kinerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi (Verhoef et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan sumber daya melalui sistem informasi yang terintegrasi (Nur & Hanif, 2024). Dengan demikian, integrasi teknologi informasi menjadi elemen kunci dalam mendukung sistem pengelolaan anggaran yang modern dan responsif.

Dalam pengelolaan anggaran di Indonesia, penerapan *e-government* diwujudkan melalui sistem terintegrasi seperti SPAN, SAKTI, dan Aplikasi Monev Keuangan yang mendukung monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara *real-time* dan berjenjang. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa kebijakan monev kinerja anggaran tidak terlepas dari pemanfaatan



teknologi informasi sebagai instrumen peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan (Hadi & Widnyani, 2024). Selain itu, pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran melalui berbagai regulasi, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang mengintegrasikan proses monev pada aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kebijakan ini menandai pergeseran penting dari pendekatan evaluasi yang sebelumnya cenderung parsial menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk melalui mekanisme reu pelaksanan anggaran dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan Aplikasi Monev Keuangan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dari tingkat satuan kerja hingga tingkat nasional. Sistem ini memungkinkan pemantauan kinerja anggaran secara *real-time* dan berjenjang sehingga pimpinan dapat melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan berbasis data. Meskipun demikian, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi monitoring dan evaluasi kinerja anggaran masih menghadapi sejumlah permasalahan. Penelitian Dwi Putranto Riau (2022) menemukan adanya keterlambatan dan ketidaklengkapan pengisian data pada aplikasi monev. Sementara itu, Puspitasari, Rachmawaty, dan Sahroni (2024) serta Aditya Martha Nugrahanto (2024) menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belum optimal pada beberapa indikator, seperti deviasi perencanaan dan realisasi anggaran, serta efektivitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada capaian kinerja, tetapi juga pada sistem dan mekanisme pengelolaannya.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar studi berfokus pada aspek kinerja administratif dan teknis, seperti nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta belum mengevaluasi sistem monitoring dan evaluasi secara komprehensif, baik dari sisi proses bisnis, formula penilaian, maupun sistem informasi. Selain itu, belum terdapat penelitian yang mengkaji sistem monev kinerja anggaran pasca diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian evaluasi kebijakan monev kinerja anggaran yang bersifat holistik dan berbasis sistem (Andrianti & Amrania, 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian ini tidak hanya menilai capaian kinerja, tetapi juga mengkaji kesesuaian konteks kebijakan, kesiapan input, kualitas proses implementasi, serta hasil yang dicapai. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk evaluasi sistem monev yang mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem informasi secara terintegrasi. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dipilih sebagai studi kasus karena memiliki karakteristik yang kompleks, ditandai dengan besarnya alokasi anggaran, banyaknya satuan kerja, serta luasnya cakupan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi perbaikan regulasi, sistem informasi, dan mekanisme implementasi monitoring dan evaluasi kinerja anggaran di Indonesia.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem monitoring dan evaluasi (monev) kinerja anggaran dalam konteks nyata organisasi. Evaluasi dilakukan menggunakan kerangka CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai kesesuaian kebijakan, kesiapan sumber daya, pelaksanaan proses, serta hasil yang dicapai. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang terdiri atas pejabat pengelola anggaran, analis anggaran, administrator aplikasi monev, serta staf pelaksana pada tingkat satuan kerja dan unit eselon I. Observasi dilakukan terhadap proses penyusunan laporan monev, penggunaan aplikasi, serta mekanisme penilaian kinerja anggaran. Studi dokumentasi mencakup penelaahan regulasi, laporan kinerja, data capaian anggaran, serta output dari aplikasi Monev Keuangan.

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Analisis data dilakukan secara interaktif sejak tahap pengumpulan data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data sesuai dengan aspek evaluasi CIPP, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar temuan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengonfirmasi informasi dari berbagai informan pada level organisasi yang berbeda. Selain itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen utama penelitian, serta lembar observasi dan daftar telaah dokumen untuk memastikan konsistensi dan keterlacakan data. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

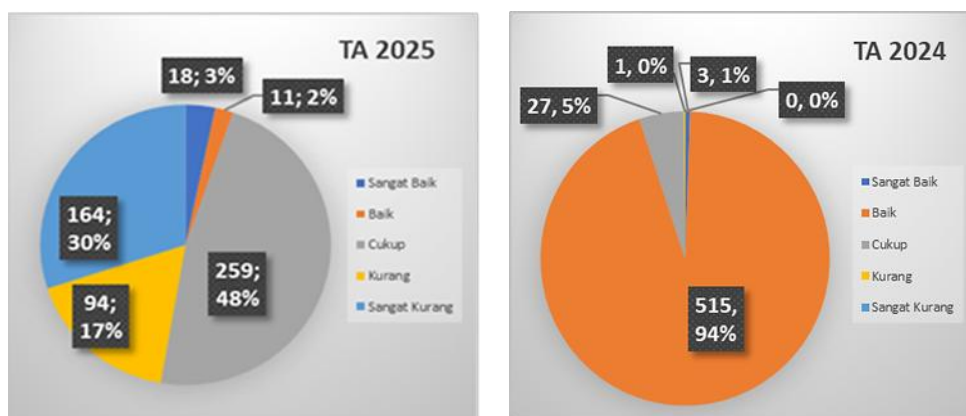
#### **Gambaran Umum dan Sistem Monitoring serta Evaluasi Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Islam**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Agama yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, penguatan moderasi beragama, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta penerangan agama Islam. Ditjen Bimas Islam membawahi 546 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dengan jumlah pegawai sebanyak 41.136 orang, yang terdiri dari 34.322 Pegawai Negeri Sipil dan 6.814 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dari sisi anggaran, pada tahun 2024 Ditjen Bimas Islam memperoleh alokasi sebesar Rp2,242 triliun dan meningkat menjadi Rp2,352 triliun pada tahun 2025.

Kinerja anggaran Ditjen Bimas Islam pada tahun 2024 mencapai nilai 93,24 dengan kategori sangat baik, yang terdiri atas aspek perencanaan sebesar 92,24 dan aspek pelaksanaan sebesar 94,24. Sementara itu, pada tahun 2025 (per 31 Desember 2025, belum tutup buku), capaian kinerja anggaran berada pada angka 53,85 yang terdiri atas aspek perencanaan sebesar 36,21 dan aspek pelaksanaan sebesar 71,19. Capaian tersebut masih bersifat sementara karena proses penginputan data capaian output satuan kerja masih berlangsung hingga 15 Januari 2026,

serta penginputan indikator kinerja program dan indikator kinerja sasaran strategis hingga 28 Februari 2026, sehingga nilai final akan diperoleh pada awal Maret 2026.

Distribusi capaian kinerja anggaran pada tingkat satuan kerja menunjukkan variasi kategori. Pada tahun 2024, terdapat tiga satuan kerja dengan kategori sangat baik (nilai >90), 515 satuan kerja (94%) pada kategori baik (nilai 80–90), 27 satuan kerja pada kategori cukup (nilai 60–80), dan satu satuan kerja pada kategori kurang (nilai 50–60). Sementara itu, pada tahun 2025 (per 31 Desember 2025), terdapat 18 satuan kerja pada kategori sangat baik, 11 satuan kerja kategori baik, 259 satuan kerja kategori cukup, 94 satuan kerja kategori kurang, dan 164 satuan kerja kategori sangat kurang. Distribusi ini menunjukkan adanya perbedaan capaian kinerja antar satuan kerja yang dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Distribusi capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Nilai kinerja anggaran satker lingkup Ditjen Bimas Islam**

*Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu (diakses pada 31 Desember 2025)*

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran pada Ditjen Bimas Islam mengacu pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan anggaran, termasuk monitoring dan evaluasi, dalam satu regulasi terpadu. Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 yang memberikan pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 yang mengatur indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) sebagai alat ukur kualitas pelaksanaan anggaran.

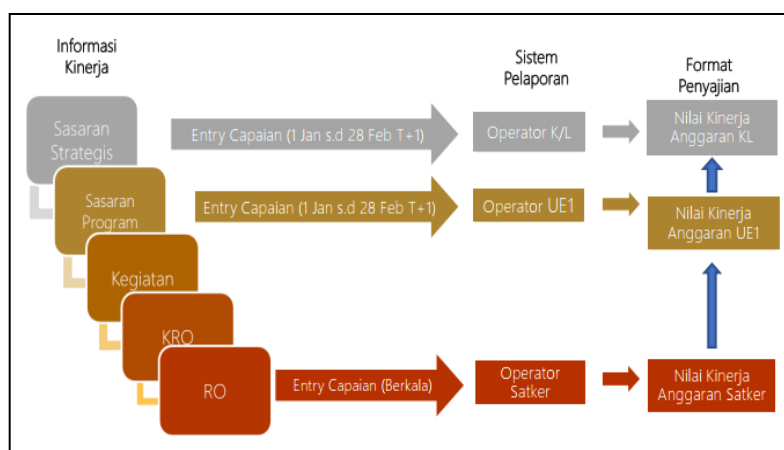
Secara operasional, proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran (PPKA) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kementerian/lembaga, unit eselon I, hingga satuan kerja sebagai pelaksana teknis. Setiap jenjang memiliki peran yang saling terintegrasi untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Proses ini berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui identifikasi capaian dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, PPKA bertujuan menjamin pengelolaan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme proses bisnis pelaksanaannya disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Proses bisnis pelaksanaan Money Kinerja Anggaran**

Tingkatan/ Unit Penganggungjawab	Objek		Waktu
	Kualitas Informasi Kinerja	Kepatuhan Terhadap Regulasi Perencanaan Anggaran	
<b>Tingkatan:</b> Kementerian/Lembaga  <b>Unit Penganggungjawab:</b> Eselon I yang menangani bidang kesekretariatan pada setiap Kementerian/Lembaga.	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas: 1. Seluruh indikator kinerja sasaran strategis pada Kementerian/Lembaga tersebut; 2. Seluruh indikator kinerja program unit eselon I di bawah kewenangannya; dan 3. Seluruh rincian output satker di bawah kewenangannya;	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Kementerian/Lembaga tersebut	1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
<b>Tingkatan:</b> Unit Eselon I  <b>Unit Penganggungjawab:</b> Unit Eselon I sebagai pengelola program	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas: 1. Seluruh indikator kinerja program pada unit eselon I tersebut; dan 2. Seluruh rincian output satker di bawah kewenangannya.	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Unit Eselon I tersebut	
<b>Tingkatan:</b> Satker  <b>Unit Penganggungjawab:</b> Satker sebagai pengelola kegiatan	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas seluruh rincian output pada satker tersebut.	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Satker tersebut	

*Sumber: Kementerian Keuangan*

Pada tingkat Kementerian/Lembaga, Eselon I yang menangani kesekretariatan bertanggung jawab memastikan kualitas informasi kinerja atas seluruh indikator sasaran strategis, indikator program unit eselon I, serta seluruh rincian output satker. Selain itu, K/L wajib melakukan PPKA terhadap seluruh komponen kepatuhan perencanaan anggaran, seperti standar biaya, pembatasan belanja, dan aturan penganggaran lainnya. Pada tingkat Unit Eselon I, unit pengelola program bertanggung jawab menjamin kualitas informasi kinerja program dan rincian output satker di bawah kewenangannya, serta memastikan kepatuhan regulasi perencanaan untuk seluruh kegiatan dalam unit tersebut. Sementara pada tingkat Satker, penilaian difokuskan pada kualitas informasi kinerja seluruh rincian output dan kepatuhan perencanaan anggaran pada tingkat kegiatan. Satker wajib melakukan PPKA secara berkala sesuai aktivitas dan sepanjang proses pelaksanaan anggaran setelah dokumen pelaksanaan disahkan.



**Gambar 2. Mekanisme Penginputan Data pada Sistem Money Kinerja Anggaran**

*Sumber: Kementerian Keuangan*

Pada tingkat kementerian/lembaga, unit eselon I yang menangani kesekretariatan bertanggung jawab dalam memastikan kualitas informasi kinerja pada indikator sasaran strategis, indikator program, serta rincian output satuan kerja. Pada tingkat unit eselon I, pengelola program bertanggung jawab terhadap kualitas capaian kinerja program dan kepatuhan perencanaan anggaran. Sementara itu, pada tingkat satuan kerja, penilaian difokuskan pada capaian output serta kepatuhan terhadap perencanaan anggaran. Dalam pelaporan kinerja, satuan kerja melakukan penginputan data capaian output setiap bulan pada awal bulan berikutnya. Unit eselon I melakukan pemantauan terhadap data tersebut serta menginput capaian sasaran program, sedangkan kementerian/lembaga memantau capaian program dan menginput capaian sasaran strategis. Mekanisme penginputan data dalam sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dapat dilihat pada Gambar 2.

Unit Organisasi	Nilai Kinerja Anggaran			
	Aspek Perencanaan (50%)		Aspek Pelaksanaan (50%)	
	Indikator	Bobot	Indikator	Bobot
Kementerian/Lembaga	1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25%	1. Revisi DIPA	10%
	2. Agregat Capaian Kinerja Program	20%	2. Deviasi Hal III DIPA	10%
	3. Agregat Capaian Output	30%	3. Penyerapan Anggaran	20%
	4. Agregat Efisiensi	25%	4. Belanja Kontraktual	10%
Unit Eselon I	1. Capaian Kinerja Program	30%	5. Penyelesaian Tagihan	10%
	2. Agregat Capaian Output Satker	45%	6. Pengelolaan UP & TUP	10%
	3. Agregat Efisiensi Satker	25%	7. Dispensasi SPM	5%
Satuan kerja	Capaian Output	75%	8. Capaian Output	25%
Perspektif Penilaian:	Efektivitas & Efisiensi		Proses (Teknis Administratif)	

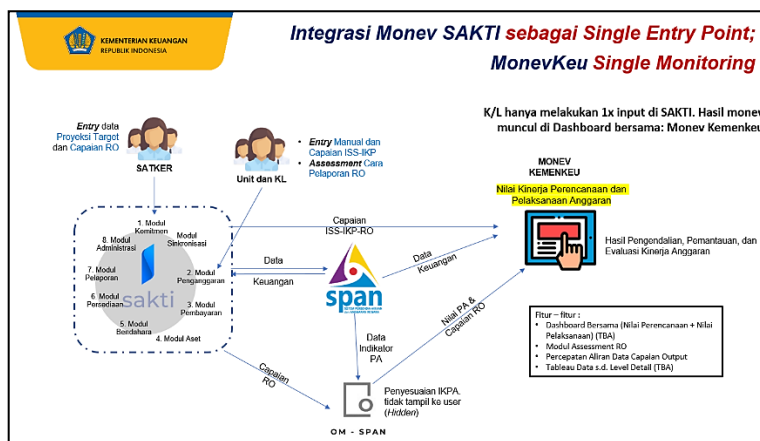
**Gambar 3 Indikator Penilaian Kinerja Anggaran**

*Sumber: Kementerian Keuangan*

Pada aspek perencanaan, penilaian difokuskan pada efektivitas dan efisiensi rencana anggaran melalui empat variabel: capaian sasaran strategis, capaian kinerja program, capaian output, serta efisiensi penggunaan anggaran dengan bobot terbesar ada pada output dan efisiensi. Pada tingkat satker, penilaian lebih menekankan capaian output (75%) dibanding efisiensi (25%). Sementara itu, aspek pelaksanaan mengukur ketertiban dan kualitas eksekusi anggaran melalui indikator seperti revisi DIPA, deviasi rencana, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dispensasi SPM, serta capaian output dengan penyerapan anggaran dan output menjadi komponen berbobot paling besar. Secara keseluruhan, kombinasi variabel ini memastikan penilaian kinerja anggaran mencerminkan baik kualitas perencanaan maupun kualitas pelaksanaan anggaran secara seimbang.

Dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, digunakan sistem informasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi berfungsi sebagai sumber utama data keuangan, sedangkan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Keuangan digunakan untuk menganalisis capaian kinerja anggaran, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Integrasi kedua sistem ini memungkinkan peningkatan kualitas pengambilan keputusan, transparansi,

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Gambaran sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4. Sistem Informasi dalam Monev Kinerja Anggaran**  
*Sumber: Kementerian Keuangan*

### Hasil Evaluasi CIPP

Subbab ini menyajikan hasil evaluasi kebijakan penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, dan product). Evaluasi dilakukan secara formatif untuk menilai kesesuaian kebijakan, kesiapan input, kualitas pelaksanaan, serta capaian hasil. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif dari tahap perencanaan hingga hasil kebijakan. Temuan dalam evaluasi ini disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang relevan.

### Evaluasi Konteks

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan Sistem Monev Kinerja Anggaran telah sesuai dengan konteks kebijakan dan kebutuhan organisasi. Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang bertujuan menilai capaian program sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan anggaran pada periode berikutnya. Selain itu, penerapan monev merupakan implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 yang menugaskan Menteri Keuangan untuk melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja anggaran. Penerapan sistem ini juga menjawab kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

### Evaluasi Input

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum komponen input dalam pelaksanaan Monev Kinerja Anggaran telah tersedia dengan baik, baik dari sisi regulasi, indikator, maupun sistem informasi. Ketersediaan komponen tersebut memberikan dasar yang cukup kuat dalam mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sistematis. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan. Kelemahan tersebut terutama berkaitan dengan aspek proses bisnis, indikator penilaian, dan sistem informasi yang digunakan.

Pada aspek proses bisnis dan indikator penilaian, mekanisme pelaksanaan monev serta indikator yang digunakan telah dirumuskan secara jelas dan terstruktur. Namun demikian,



terdapat ketidaksinkronan level regulasi antara aspek perencanaan dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat harmonisasi kebijakan. Selain itu, ditemukan adanya duplikasi variabel capaian output pada dua aspek penilaian yang menyebabkan terjadinya double counting dan berpotensi menimbulkan distorsi dalam interpretasi nilai kinerja. Permasalahan lain meliputi keterbatasan penggunaan standar biaya keluaran umum (SBKU), keterlambatan pengisian indikator kinerja, tidak adanya mekanisme verifikasi data, serta rumusan output yang belum sepenuhnya terukur.

Pada aspek sistem informasi, penggunaan Aplikasi MonevKeu secara umum telah memadai, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Krisna dan SAKTI. Sistem ini juga telah mampu mendukung kebutuhan dasar monitoring dan evaluasi serta meminimalkan kesalahan input data. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penggunaan sistem tersebut. Kendala tersebut meliputi ketidaksinkronan data akibat interkoneksi antar aplikasi, adanya jeda waktu (time lag) dalam aliran data, tidak tersedianya data historis untuk analisis tren, serta belum terintegrasinya data realisasi anggaran dalam satu platform.

#### **Evaluasi Proses/Pelaksanaan**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Monev Kinerja Anggaran telah berjalan dengan cukup baik pada berbagai level organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh kedisiplinan operator dalam melakukan penginputan data serta kepatuhan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya forum pemantauan kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi permasalahan secara dini melalui mekanisme early warning system. Koordinasi antarunit kerja juga berjalan efektif dalam mendukung kelengkapan data, klarifikasi informasi, serta tindak lanjut hasil pemantauan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan, terutama terkait dengan beban kerja operator. Banyak operator yang merangkap tugas dalam pengelolaan beberapa aplikasi sekaligus, seperti SAKTI, MonevKeu, dan sistem lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan kerja serta menurunkan ketelitian dalam penginputan data. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan sistem.

#### **Evaluasi Produk/Hasil**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja anggaran pada tingkat Unit Eselon I, khususnya Ditjen Bimas Islam, berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, laporan monitoring dan evaluasi telah disusun secara sistematis dan digunakan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Hasil evaluasi ini juga telah dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga. Namun demikian, pemanfaatan hasil evaluasi dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun berikutnya belum optimal. Proses perencanaan anggaran masih lebih banyak bertumpu pada realisasi anggaran dibandingkan hasil evaluasi kinerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil evaluasi dengan proses pengambilan keputusan kebijakan. Oleh karena itu, peran sistem monev sebagai instrumen utama dalam penganggaran berbasis kinerja masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi CIPP menunjukkan bahwa penerapan Sistem Monev Kinerja Anggaran telah memiliki kesesuaian konteks dan dukungan input yang memadai. Proses pelaksanaan juga telah berjalan relatif baik dengan dukungan koordinasi dan mekanisme pemantauan yang terstruktur. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek



regulasi, sistem informasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan integrasi kebijakan, peningkatan kualitas sistem informasi, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses perencanaan anggaran.

## **Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan kerangka evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa model CIPP merupakan kerangka evaluasi yang bersifat komprehensif dan multidimensional karena mampu mengintegrasikan penilaian terhadap konteks, input, proses, dan produk secara sistematis untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan program secara berkelanjutan (Zhang et al., 2025). Pada aspek konteks, kesesuaian sistem movev dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan regulasi yang berlaku menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dirancang berdasarkan kebutuhan dan tuntutan lingkungan organisasi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa evaluasi konteks dalam model CIPP berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan, peluang, serta kesesuaian kebijakan dengan tujuan organisasi sehingga menjadi dasar rasional dalam pengambilan keputusan program (Karim, 2021). Selain itu, studi terbaru juga menegaskan bahwa komponen konteks dalam CIPP memiliki peran dominan dalam memastikan relevansi kebijakan dan kesesuaiannya dengan lingkungan strategis organisasi, sehingga mendukung keberlanjutan implementasi program berbasis bukti (Wulan et al., 2026). Dengan demikian, kesesuaian konteks menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan.

Pada aspek input, meskipun secara umum telah tersedia regulasi dan sistem informasi yang memadai, temuan penelitian menunjukkan adanya kelemahan struktural yang berdampak pada kualitas evaluasi. Ketidaksinkronan regulasi dan duplikasi variabel penilaian menunjukkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi secara konseptual. Selain itu, kendala pada sistem informasi seperti ketidaksinkronan data dan tidak real-time-nya informasi menunjukkan adanya gap antara desain sistem dan kebutuhan pengguna. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa kualitas input dalam evaluasi program sangat ditentukan oleh tingkat integrasi desain kebijakan, kejelasan indikator, serta keterpaduan sistem yang mendukung implementasi program secara efektif (Shin et al., 2023). Lebih lanjut, kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan juga menunjukkan bahwa evaluasi pada tahap input perlu memastikan adanya keselarasan antara desain program dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga proses evaluasi dapat berjalan secara optimal dan partisipatif (Chen et al., 2024). Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas input tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh konsistensi dan integrasi antar komponen sistem, sebagaimana ditekankan dalam model CIPP.

Pada aspek proses, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berjalan relatif baik menunjukkan bahwa sistem telah mampu diimplementasikan secara operasional. Kedisiplinan operator, keberadaan forum pemantauan, serta mekanisme *early warning system* menjadi indikator bahwa proses movev telah berjalan sesuai dengan desain yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa efektivitas proses monitoring dan evaluasi sangat ditentukan oleh kejelasan alur kerja, mekanisme koordinasi, serta penggunaan indikator yang terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam organisasi (Kuchenmüller et al., 2022). Namun demikian, tingginya beban kerja operator menunjukkan adanya keterbatasan



kapasitas sumber daya manusia yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa kapasitas sistem monitoring dan evaluasi, baik pada level individu, organisasi, maupun sistem, merupakan faktor kunci yang memengaruhi kualitas implementasi program dan keberhasilan proses evaluasi secara keseluruhan (Masvaure & Fish, 2022). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan proses tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh dukungan kapasitas pelaksana di lapangan.

Pada aspek produk, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara hasil evaluasi dengan pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun hasil monev telah digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan anggaran masih terbatas. Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan seharusnya menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa depan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi sering kali belum memberikan dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan karena lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses perencanaan dan perbaikan kebijakan (Ayele., 2024). Selain itu, studi terbaru juga menegaskan bahwa evaluasi dan monitoring seharusnya menjadi dasar dalam perumusan kebijakan baru yang lebih terarah dan berbasis hasil, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan secara berkelanjutan (Rosmalina & Elfrianto, 2024). Oleh karena itu, keterbatasan pemanfaatan hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa fungsi evaluasi sebagai instrumen pembelajaran kebijakan (*policy learning*) belum berjalan optimal.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran telah berjalan secara struktural dan operasional, namun belum sepenuhnya optimal secara fungsional. Permasalahan utama tidak terletak pada keberadaan sistem, melainkan pada integrasi antar komponen serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses pengambilan keputusan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemenuhan administratif (*compliance*) dan efektivitas substantif sistem. Oleh karena itu, penguatan sistem monev ke depan tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas integrasi data, harmonisasi indikator kinerja, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengolah dan menginterpretasikan hasil evaluasi secara analitis. Selain itu, penguatan fungsi *feedback loop* menjadi krusial agar hasil evaluasi tidak berhenti pada pelaporan, melainkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja dan sebagai instrumen pembelajaran organisasi yang mendorong perbaikan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, dapat disimpulkan bahwa pada aspek konteks, sistem yang diterapkan telah selaras dengan kerangka penganggaran berbasis kinerja, ketentuan regulasi yang berlaku, serta kebutuhan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBN. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, sistem tersebut telah memiliki dasar yang kuat dalam mendukung akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran. Pada aspek input, masih ditemukan beberapa kendala, terutama pada regulasi dan sistem informasi, seperti ketidaksinkronan antarlevel aturan, duplikasi variabel, serta formula efisiensi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian kinerja. Selain itu, pada sistem informasi masih terdapat keterbatasan interkoneksi antar aplikasi, *time lag* data, dan belum optimalnya



kelengkapan menu. Sementara itu, pada aspek proses, penginputan data telah dilakukan secara tertib, didukung forum pemantauan berkala, serta koordinasi antarunit yang berjalan dengan baik.

Adapun pada aspek produk, hasil evaluasi telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga, sehingga menunjukkan adanya kontribusi terhadap akuntabilitas kinerja anggaran. Meskipun demikian, pemanfaatan hasil evaluasi tersebut masih perlu dioptimalkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam perlu terus diperkuat, khususnya pada aspek sinkronisasi regulasi dan integrasi sistem informasi. Selain itu, peningkatan kualitas data serta penyempurnaan mekanisme evaluasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang lebih akurat, adil, dan akuntabel di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Martha Nugrahanto. (2024). Nilai Kinerja Anggaran Sebagai Tolak Ukur Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Balai Diklat Keagamaan Manado. *Transformasi*, 6(2). <https://transformasi.kemenag.go.id/journal/id/article/view/315>
- Andari, R. P., Yanto, S., Andreas, D. N., & Prasetyo, H. (2024). Implementasi Pengelolaan APBN Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11), 4409–4414. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/17766>
- Andrianti, P. M., & Amrania, G. K. P. (2025). Analysis Of Budget Implementation Quality Through Budget Absorption Indicators At BKPM In 2023. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v9i1.2676>
- Ayele, C., Bekele, M., & Tafasse, M. (2024). Monitoring And Evaluation Practices: Implication To Education Policy Implementation In Gambella Region, Ethiopia. *Education Journal*, 13(3), 115–123. <https://doi.org/10.11648/j.edu.20241303.14>
- Chen, H. T., Morosanu, L., & Chen, V. H. (2024). Program Plan Evaluation: A Participatory Approach To Bridge Plan Evaluation And Program Evaluation. *American Journal Of Evaluation*. <https://doi.org/10.1177/10982140241231906>
- Dwi Putranto Riau. (2022). Strategi Pengendalian Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Anggaran: Studi Evaluasi Pengisian Aplikasi SMART Dan E-Monev Di KPU Kab/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://pdfs.semanticscholar.org/f121/dcef55e7b8be9bb0a7a7536bdc429e20c3a5.pdf>
- Hadi, I., & Widnyani, I. A. P. S. (2024). Modernization And Digitalization Of Public Services: Realizing A Golden Indonesia Through Harmonization Of Electronic-Based Government Systems (SPBE). *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*, 6(2), 639–658. <https://doi.org/10.53863/kst.v6i02.1398>
- Karim, M. R. (2021). *Programme Evaluation: An Analysis Of Context, Input, Process And Product (CIPP) Model*. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.33477.99040>



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita: Kinerja Dan Fakta*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Reviu Pelaksanaan Anggaran Sebagai Bagian Dari Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Anggaran*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/data-publikasi/laporan/rpa2.html>
- Kuchenmüller, T., Chapman, E., Takahashi, R., & Lester, L. (2022). A Comprehensive Monitoring And Evaluation Framework For Evidence To Policy Networks. *Evaluation And Program Planning*, 91, 102053. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102053>
- Masvaure, S., & Fish, T. E. (2022). Strengthening And Measuring Monitoring And Evaluation Capacity In Selected African Programmes. *African Evaluation Journal*, 10(1), A635. <https://doi.org/10.4102/aej.v10i1.635>
- Megah S, K. I., & Valiant S, R. (2025). Systematic Literature Review: Assessing The Effectiveness Of Performance-Based Budgeting In Government Financial Management. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 10(1), 52–74. <https://doi.org/10.24905/jip.10.1.2025.52-74>
- Nur, A. F., & Hanif, M. (2024). Digitalisasi Untuk Transparansi Keuangan Sekolah Di Mts Ma'arif NU 1 Sumbang. *Edutech: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 4(2), 67–74. <https://doi.org/10.51878/edutech.v4i2.3061>
- Puspitasari, D., Rachmawaty, R., & Sahroni, S. (2024). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Dalam Pencapaian Realisasi Anggaran Pada Kantor ATR/BPN Kota Tangerang Selatan Tahun 2020–2024. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1). <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6649>
- Rosmalina, R., & Elfrianto, E. (2024). Evaluation And Monitoring As An Effort To Improve The Quality Of Education. *Indonesian Journal Of Education*, 3(1). <https://doi.org/10.56495/ije.v3i1.567>
- Rosmiati, N., & Rizkianto, E. (2024). Budget Performance Evaluation Before And During The COVID-19 Pandemic. *Journal Of Economic, Business & Accounting Research*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/jembar.v1i2.2024.276>
- Shin, J. E., Yu, M. J., & Lee, S.-W. (2023). Comprehensive Evaluation Framework Building For Integrated Development Program. *Evaluation*, 29(3), 343–360. <https://doi.org/10.1177/13563890231183990>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2022). Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection And Research Agenda. *Journal Of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wulan, M. P., Listyasari, W. D., Santosa, H., & Huda, S. A. (2026). A Systematic Literature Review On The CIPP Evaluation Model In Education: Examining Its Trends, Applications, And Research Gaps. *Journal Of Educational Sciences*, 10(3), 307–320. <https://jes.ejournal.unri.ac.id/index.php/jes/article/view/1553>



**CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan**

Vol. x, No. x, Januari-April 2026

e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030

Online Journal System : <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>



**Jurnal P4I**

Zhang, S., Bai, L., & Yang, B. (2025). Mixed Teaching Quality Evaluation Of Organizational Behavior Course Based On CIPP Model. *Frontiers In Education*, 10, 1538539. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1538539>